

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA  
PINTAR KULIAH (KIP-K) DI FISIP UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

**Pandu Yufa Dharma, Saipul**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 3, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman.

Pengarang : Pandu Yufa Dharma

NIM : 2002016084

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 25 Juni 2024

**Pembimbing,**



**Dr. Saipul, M.Si**

**NIP 19760907 200312 1 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b><u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u></b> <b>NIP 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 3	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 709-718	

# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pandu Yufa Dharma <sup>1</sup>, Saipul <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman dengan fokus penelitian standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya implementor karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik selain itu faktor penghambat implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dari key informan yaitu Kepala dan staf Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman belum dikatakan berjalan secara maksimal sesuai dengan yang dituliskan pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar yaitu kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pengawasan dalam seleksi pemberian bantuan KIP-K serta kuota yang terbatas disetiap prodinya.*

**Kata Kunci :** KIP-K, Perguruan Tinggi

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan SDM sebuah negara. Pendidikan juga menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia dimana sudah tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menginginkan semua anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan dengan baik serta layak sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [panduyufa03@gmail.com](mailto:panduyufa03@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Indonesia untuk kedepannya. Oleh karena itu, banyak kebijakan atau program yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia yang mendukung anak-anak agar dengan mudah mendapatkan akses pendidikan. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwasanya bantuan ini diperuntukan kepada mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi termasuk bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan prioritas utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Mulawarman telah memberikan bantuan ini secara rutin setiap tahunnya. Salah satunya fakultas yang ada dibawah naungan Universitas Mulawarman yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk mengikuti program Pemerintah ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan dengan memberikan pelayanan dan pemberian akses kepada mereka yang tertarik untuk menempuh perguruan tinggi dengan membuka pendaftaran bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Setelah penulis melakukan pengamatan awal terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman yaitu kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pengawasan dalam seleksi pemberian bantuan KIP-K serta terbatasnya kuota yang diberikan disetiap program studi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan pokok tentang bagaimana implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik dan Implementasinya***

Kebijakan Publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam pelaksanaannya kebijakan publik ialah hasil dari proses politik yang dilakukan dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara yang isinya berupa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah selaku penyelenggara negara. Kebijakan Publik merupakan keputusan yang mengikat untuk semua orang yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Karena bersifat mengikat publik, maka harus dibuat oleh otoritas politik yaitu mereka yang telah mendapatkan amanah atau mandat dari publik melalui proses pemilihan atas nama rakyat.

Selain itu, Kebijakan publik menurut Dye dalam Abdoellah (2016:18), *“Public policy is whatever the government choose to do or not to do”* (kebijakan publik ialah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka akan ada tujuan karena kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah sebaliknya jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada maksud tujuannya.

Dalam implementasi ada banyak model implementasi salah satunya adalah model implementasi Meter dan Horn. Model implementasi menurut Meter dan Horn (1975:462-473) terdapat variabel didalamnya yaitu:

1. Standar dan Sasaran

Tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan bisa dilihat melalui ukuran serta tujuan yang dianggap realistis dengan keadaan di lapangan. Apabila kebijakan tersebut terlalu ideal untuk dilakukan masyarakat maka akan sulit dilakukan sehingga nanti jauh dari kata sukses atau berhasil.

2. Sumber daya

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya sumber daya. Pada bagian ini tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, tetapi juga sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dengan ciri-ciri pelaksana kebijakan yang tepat maka akan semakin dekat dengan keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh itu, maka harus dipilih dengan tepat sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

4. Komunikasi antar organisasi

Dalam implementasi kebijakan publik, koordinasi adalah metode atau mekanisme yang ampuh untuk dilakukan demi kelancaran perihal implementasi. Dimana komunikasi yang terjalin dengan baik maka akan semakin baik juga jalannya implementasi tersebut. Karena dengan komunikasi yang baik akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi.

5. Disposisi

Salah satu hal lain yang menjadi faktor berhasil atau tidaknya implementasi adalah sikap dari pelaksana mengenai menerima atau menolak kebijakan tersebut. Hal ini menjadi mungkin terjadi disebabkan kebijakan tersebut bukanlah hasil yang dibuat oleh masyarakat selaku obyek implementasi yang mengetahui atau merasakan persoalan atau permasalahan tersebut

6. Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

Pada bagian ini perlu adanya perhatian untuk bisa menilai kinerja dari implementasi kebijakan publik adalah sudah sampai mana lingkungan internal ikut melakukan sesuatu agar bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak mendukung maka bisa menjadi faktor gagalnya implementasi tersebut. Karena itu, perlu diciptakannya kondisi lingkungan yang kondusif.

### ***Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)***

Pemerintah telah banyak menyediakan kebijakan atau program yang bergerak dibidang pendidikan, salah satunya adalah KIP-K. Bantuan ini merupakan lanjutan dari bantuan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan pada saat mahasiswa mengenyam pendidikan di tingkat SD hingga SMA atau Sederajat. KIP-K sendiri merupakan penyempurna dari program bantuan pemerintah sebelumnya yaitu bidikmisi yang mempunyai tujuan yang sama untuk membantu masyarakat kurang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Program ini merupakan perwujudan dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang berprestasi serta memiliki pemikiran yang kritis demi kemajuan bangsa Indonesia. Banyak sekali mahasiswa yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu oleh karena itu perlu perhatian lebih dalam pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dijelaskan bahwa pemerintah mendukung penuh pendidikan wajib hingga 12 tahun untuk meningkatkan kualitas anak-anak indonesia serta memberikan seluas-luasnya kesempatan belajar hingga ke perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

### ***Definisi Konsepsional***

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan definisi konseptual implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan finansial untuk pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). KIP-K ini diberikan kepada mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi, terutama mahasiswa dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Selain itu, program ini juga memberikan prioritas kepada mahasiswa yang merupakan pemegang KIP, mahasiswa asal daerah khusus seperti Papua, Papua Barat, daerah 3T, TKI, serta mahasiswa yang terdampak oleh bencana, konflik sosial, atau situasi istimewa lainnya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut : Program KIP-K di FISIP Universitas Mulawarman dilihat dari : a). Standar dan sasaran, b). Sumber daya, c). Karakteristik agen pelaksana, d). Komunikasi antar organisasi, e). Disposisi, dan f). Lingkungan ekonomi, politik dan sosial serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai *Key Informan*, serta mahasiswa penerima KIP-K di fakultas tersebut sebagai informan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, dokumen, arsip yang relevan, dan sumber *online*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif oleh Miles & Huberman (2014) yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***1. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman***

Berdasarkan model teori dari Van Meter dan Van Horn, untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi dilihat dengan beberapa indikator sebagai berikut:

#### ***a. Standar dan sasaran***

Van Meter dan Van Horn dalam Sahya (2014:242) telah mengemukakan bahwa dalam keberhasilan dalam implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran sehingga membutuhkan tujuan yang jelas ingin dicapai. Oleh karena itu, butuh standar yang jelas agar apa yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan mengenai standar dan sasaran bantuan ini diberikan. Pada pasal 1 dijelaskan kepada siapa bantuan ini diberikan yaitu kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan dan Pasal 2 juga menjelaskan tujuan bantuan ini diberikan yaitu untuk dapat meningkatkan akses pendidikan yang merata kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Selain itu, pada Pasal 5 dijelaskan mengenai prioritas sasaran bantuan KIP-K.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa dari segi standar dan sasaran penerimaan KIP-K di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman memiliki masalah mengenai kurang tepat sarasanya bantuan yang diberikan. Hal ini dibuktikan banyak ditemukan di lapangan mahasiswa yang mampu secara finansial namun masih menerima bantuan KIP-K padahal masih banyak mahasiswa yang membutuhkan tidak mendapatkannya. Peneliti menyimpulkan masih kurangnya pengetahuan mengenai standar dan sasaran dilapangan yang menyebabkan masih banyak ditemukan ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan KIP-K. Hal ini banyak sekali dikeluhkan karena masih banyak mahasiswa yang mampu mendapatkan bantuan ini sehingga kuota yang terbatas disetiap prodinya tidak dapat mencakup mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya.

Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memberikan akses pendidikan yang layak kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kesulitan dalam hal finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan yang tercantum didalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.

**b. Sumber daya**

Van Meter dan Van Meter dalam Sahya (2014:465) mengatakan bahwa sumber daya salah satu variabel yang mempengaruhi antara keberhasilan dan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya waktu. Sumberdaya dapat dikatakan dapat berhasil apabila dapat memanfaatkan dan bertanggungjawab di dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar dimana Sumber daya finansial berasal dari APBN yang diberikan untuk bidang pendidikan sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 13 ayat 2. Proses pencairan dilakukan dengan mengaet bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa dalam sumber daya manusia masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah personil yang ditugaskan dalam melakukan verifikasi secara langsung di lapangan dimana permasalahan bermula dari awal pendaftaran. Banyak sekali kecurangan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dalam pendaftaran KIP-K yang dilakukan secara *online*. Bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan seringkali dimanipulasi agar dapat lolos dalam seleksi. Masalah ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik karena hampir disemua perguruan tinggi mengalami hal tersebut. Untuk sumber daya finansial dapat dikatakan baik karena anggaran yang diberikan pemerintah sudah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa selama masa perkuliahan di masing-masing daerah atau perguruan tinggi.

**c. Karakteristik agen pelaksana**

Karakteristik pelaksana adalah salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Dalam proses ini, perlu diidentifikasi dan dipahami karakteristik pelaksana termasuk struktur birokrasi dan pola hubungan dalam birokrasi tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Di Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, kewenangan terbatas pada verifikasi pendaftar KIP-K tanpa memeriksa apakah mahasiswa yang diterima benar-benar membutuhkan bantuan. Akibatnya, masih banyak mahasiswa yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima KIP-K tetapi tidak mendapatkannya

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya tindakan yang dilakukan dalam penindakan kepada mahasiswa yang tidak sesuai dengan tujuan beasiswa ini diberikan oleh pemerintah yaitu untuk



mahasiswa yang tergolong tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam finansial. Hal ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang tergolong mampu mendaftar KIP-K padahal tidak sesuai dengan diperuntukkan kepada siapa bantuan ini diberikan.

#### **d. Komunikasi**

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Komunikasi ini dapat berupa penyampaian informasi kepada pelaksana agar mereka memahami isi, tujuan, arah, dan sasaran kebijakan tersebut. Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 12 hanya menjelaskan bahwa tugas pengelola meliputi pengusulan, pemantauan, dan penerimaan peserta didik yang memenuhi kriteria.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa untuk bagian komunikasi masih kurang maksimal karena masih banyak mahasiswa yang kurang mengetahui atau kurang informasi yang mereka dapatkan mengenai bantuan ini. Kurangnya informasi ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah kurang tertariknya mahasiswa dalam menggali informasi lebih lanjut mengenai program KIP-K dan kurang dari pihak fakultas dalam menyebarkan informasi mengenai program KIP-K. Ada banyak sekali cara agar informasi dapat tersampaikan dengan baik seperti media sosial dan sosialisasi secara langsung atau *online* di sekolah-sekolah. Media sosial memiliki peran yang penting dalam penyebaran informasi dimana dapat diakses oleh calon-calon penerima bantuan KIP-K yang masih duduk dibangku SMA ataupun yang sedang *gapyear*. Sedangkan sosialisasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya karena dalam forum sosialisasi dapat memberikan kesempatan untuk dapat bertanya seputar dengan program KIP-K.

#### **e. Disposisi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:472) Disposisi adalah salah satu variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah kebijakan. Jika para pelaksana menyetujui isi kebijakan, mereka cenderung akan melaksanakannya dengan baik. Sebaliknya, jika tidak mereka mungkin menghadapi banyak kendala. Para pelaksana harus memahami setiap tahap program yang sedang dijalankan agar program dapat berjalan dengan lancar. Tanpa pemahaman yang cukup, kemungkinan besar program tidak akan berjalan efektif. Dalam implementasi Program KIP-K di FISIP Universitas Mulawarman pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari respons positif dan dukungan yang diberikan oleh fakultas kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan KIP-K.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa untuk bagian disposisi sudah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan pihak fakultas yang membantu mahasiswa yang kesulitan dalam mengurus KIP-K ini dengan baik dan

responsif serta tidak ada pihak yang mempersulit proses pencairan. Selain itu, pihak fakultas juga sangat mendukung adanya program ini karena dengan adanya bantuan ini sangat membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial untuk bisa mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

**f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Variabel yang berikutnya perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Van Meter dan Van Horn (1975:472) menyatakan bahwa variabel ini sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dukungan dari kelompok lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan harapan.

Dalam melaksanakan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tentang Program Indonesia Pintar pada bagian lingkungan sosial, politik dan ekonomi program ini sangat baik, karena FISIP Universitas Mulawarman merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa menjadi perantara dari pemerintah agar banyak mahasiswa yang menempuh ke pendidikan tinggi di Universitas Mulawarman. Selain itu, para penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program beasiswa KIP-K. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah dapat bisa lebih memperbaiki dan memberikan tambahan anggaran beasiswa terutama bantuan KIP-K agar bisa dapat bisa mencakup banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan namun terkendala oleh finansial atau biaya.

**2. Faktor Penghambat Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman**

Adapun beberapa penghambat dalam implementasi program ini sebagai berikut:

- 1) Kurang maksimalnya pengawasan dalam pemberian bantuan KIP-K. Pengawasan secara langsung diperlukan karena merupakan awal mula dari kecurangan berasal dari pendaftaran. Kerena berkas yang harus diunggah hanya melalui *website* saja dan tidak ada pengecekan mengenai kebenaran dari berkas tersebut. Banyak permasalahan yang muncul karena kurang pengawasan dalam verifikasi secara langsung salah satunya adalah memanipulasi data yang seharusnya. Masalah ini sudah menjadi rahasia umum banyak dilakukan demi mendapatkan bantuan KIP-K.
- 2) Kurang maksimal pemberian informasi sehingga masih banyak yang tidak mengetahui kapan dibuka KIP-K, selain itu kurang pemahaman mengenai tujuan diberikannya bantuan KIP-K karena masih terdapat mahasiswa yang sebenarnya masih tergolong mampu tetapi ikut mendaftar.

- 3) Terbatasnya kuota yang diberikan disetiap prodi. Kuota yang diberikan kadang kali tidak dapat menutupi jumlah pendaftar yang ada sehingga tidak dapat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan bantuan KIP-K ini.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di FISIP Universitas Mulawarman telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal dan optimal. Masih banyak perbaikan yang dapat dilakukan agar permasalahan tersebut bisa ditangani. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan ketidaktepat sasaran bantuan KIP-K ini diberikan karena berkas yang diunggah mahasiswa tidak dicek kembali kebenarannya, selain itu kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai bantuan KIP-K sering kali menjadi permasalahan karena mahasiswa yang masih tergolong mampu ikut mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kegunaan bantuan ini diadakan, serta kuota yang terbatas masih menjadi permasalahan yang harus diperbaiki agar dapat diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Adapun penghambat dalam implementasi program ini adalah kurangnya personil dalam melakukan verifikasi secara langsung kerumah masing-masing pendaftar bantuan KIP-K, kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap bantuan KIP-K, dan kuota yang diberikan terbatas di setiap prodinya.

### ***Saran***

Berdasarkan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam program KIP-K di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan atau direkomendasikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menambah personil yang bertugas dalam melakukan verifikasi secara langsung kerumah masing-masing pendaftar agar dapat diseleksi dengan ketat.
2. Meningkatkan sosialisasi yang merata agar semua calon pendaftar dapat memperoleh informasi dengan mudah di jurusan dan program studi yang dituju.
3. Dapat menyesuaikan kuota bantuan disetiap prodi agar dapat tersalurkan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, Y, Awan. Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung:Pustaka Setia

- Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. (2021). *Buku Saku KIP Kuliah Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Herlinawati, Heriyati, E., Sudiyono, Susanto, A.B. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP) : Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA: Sage Publications.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta : Bandung
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488, Diunduh dari <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps : Yogyakarta